

SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA STABIL DI TENGAH DIVERGENSI PEREKONOMIAN GLOBAL

“Sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta kinerja intermediasi yang kembali meningkat, di tengah masih tingginya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global”



Global

Divergensi respons kebijakan negara-negara utama sejalan dengan divergensi perkembangan perekonomian.

The Fed mensinyalkan masih akan ada kenaikan suku bunga di tahun ini.

Bank sentral Eropa menempuh kebijakan untuk menaikkan suku bunga.

Tiongkok mengeluarkan stimulus dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah.

Domestik

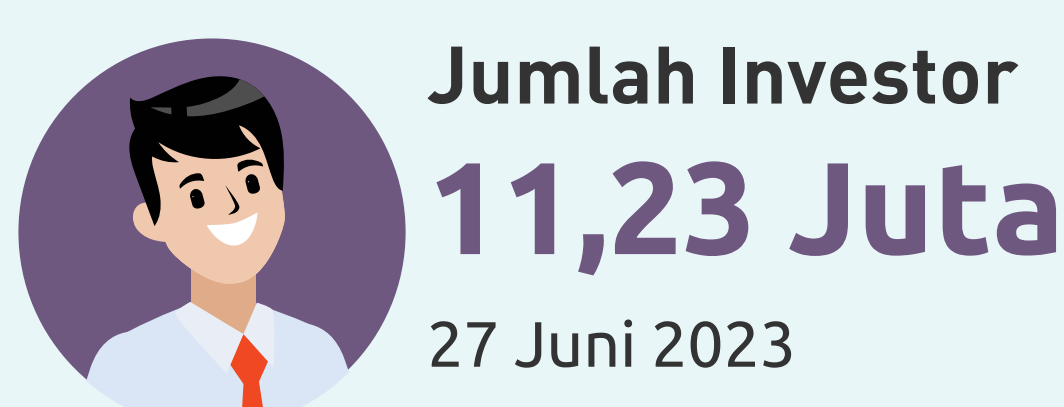
Kinerja perekonomian nasional terpantau positif:

- Inflasi Juni 2023 sebesar 3,52 persen yoy (Mei 2023: 4 persen).
- Neraca perdagangan di Mei 2023 mencatatkan surplus.
- Optimisme konsumen meningkat.
- Kinerja sektor riil terpantau positif.

Rilis laporan *Article IV Consultation* oleh IMF menilai kinerja perekonomian nasional relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain/peers yang didukung oleh resiliensi sektor keuangan.

Berdasarkan asesmen OJK sampai dengan kuartal pertama 2023 menunjukkan jumlah korporasi dalam tekanan terus menurun.

Pasar Modal



Securities Crowdfunding (SCF)

16 penyelenggara berizin OJK

Rp896,80 miliar total dana yang dihimpun

per 27 Juni 2023

419 penerbit

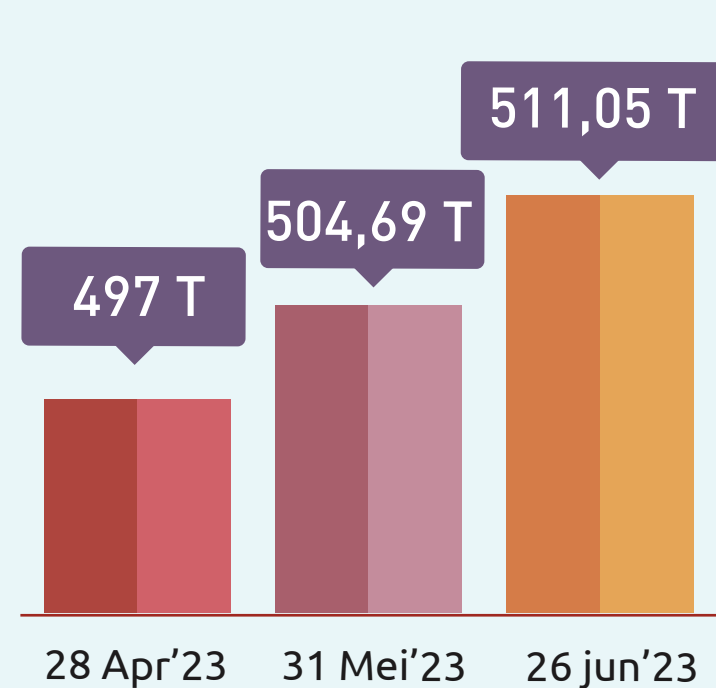
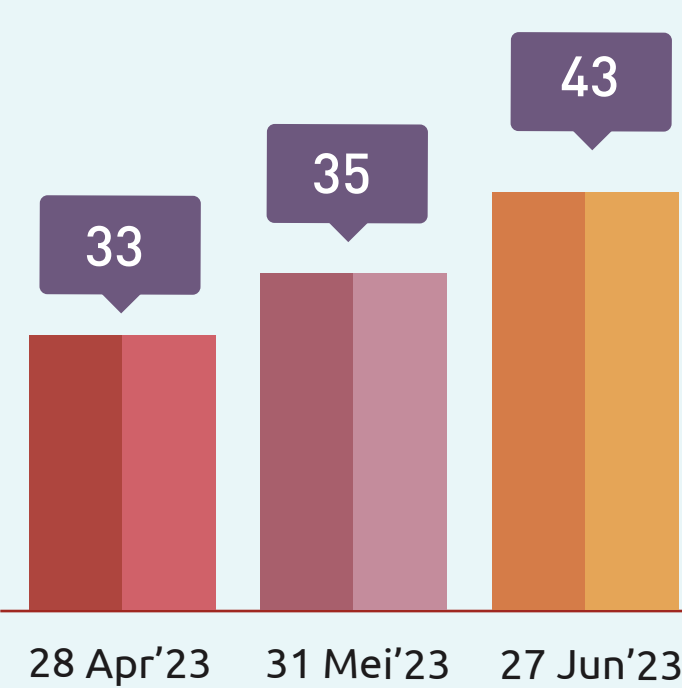
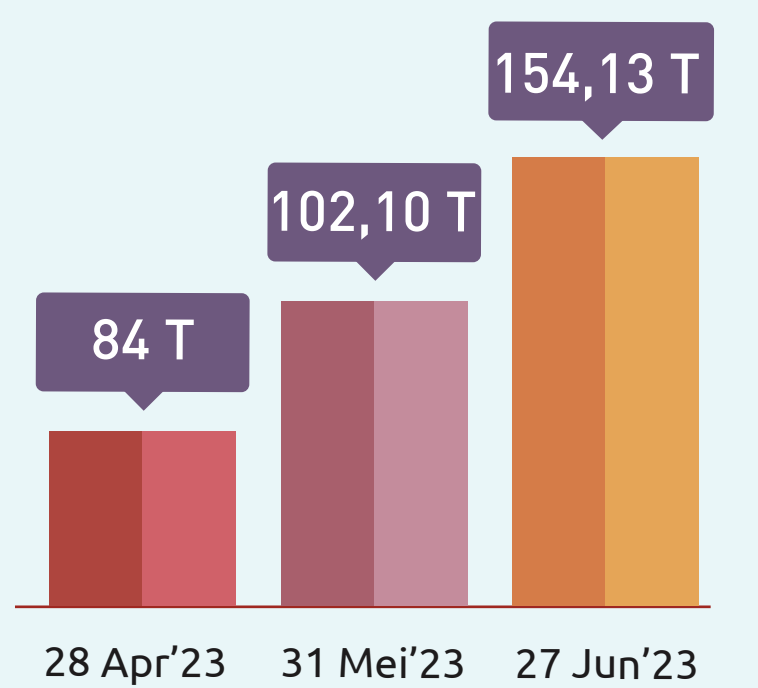
156.155 pemodal



Nilai Penghimpunan Dana

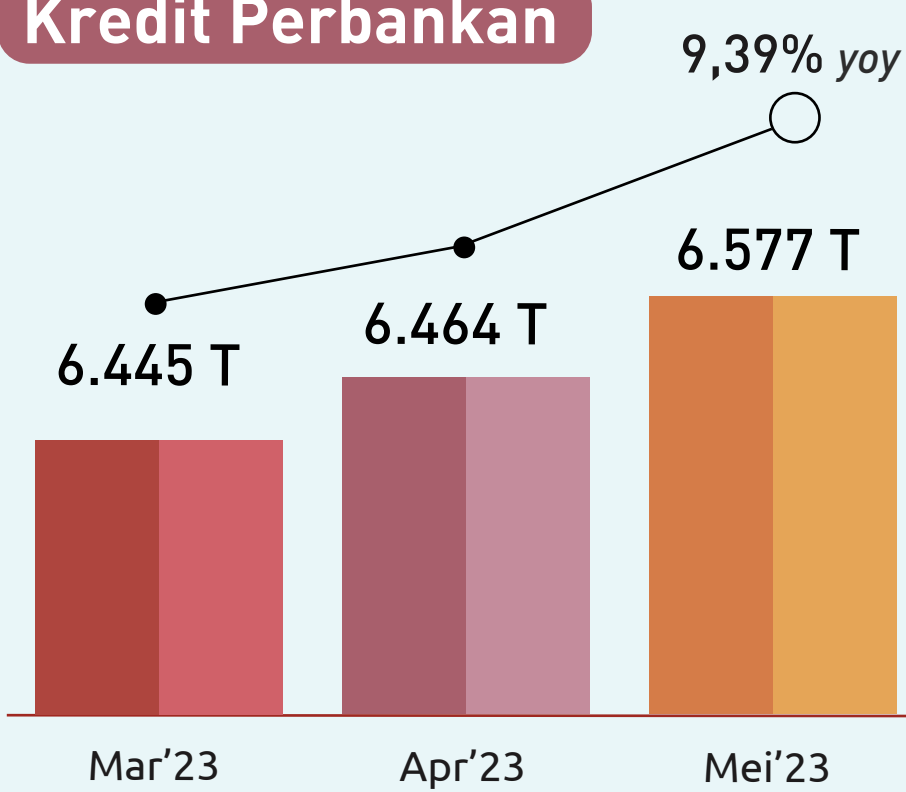
Emiten Baru

NAB Reksa Dana

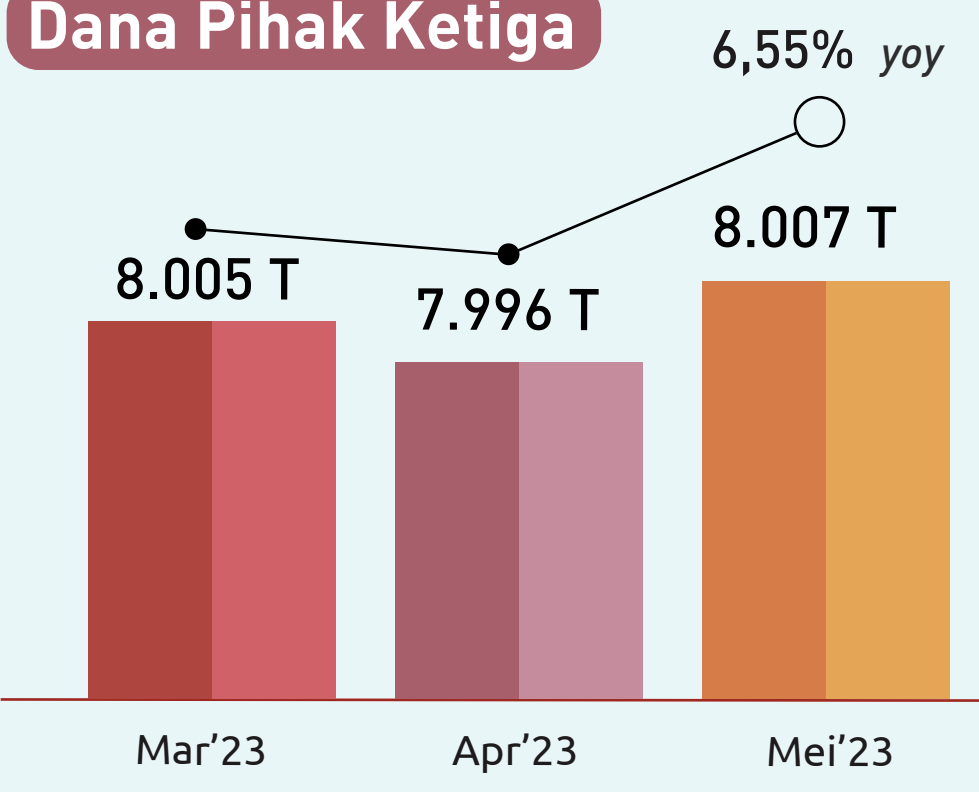


Perbankan

Kredit Perbankan



Dana Pihak Ketiga



Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun

Nominal Kredit

Apr'23 386,03 T
Mei'23 372,07 T

Jumlah Debitur

Apr'23 1,74 juta nasabah
Mei'23 1,64 juta nasabah

Kredit Investasi

12,69% yoy

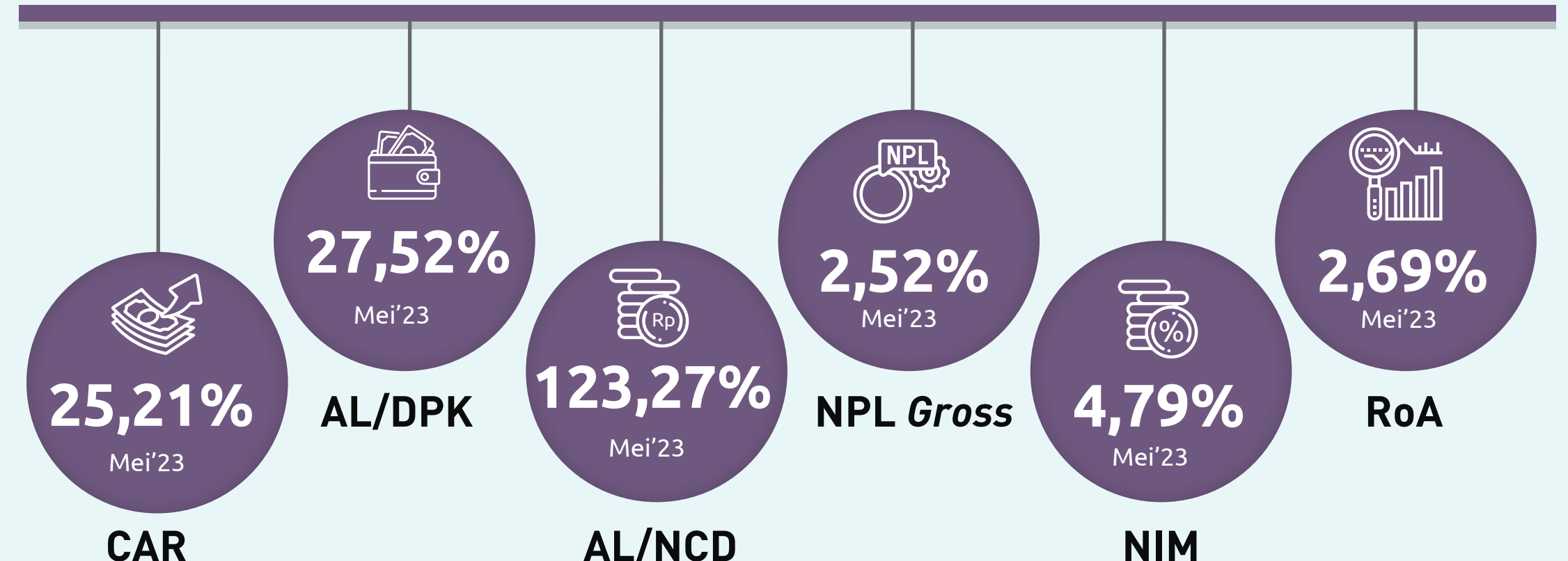


Kredit Modal Kerja

7,39% yoy

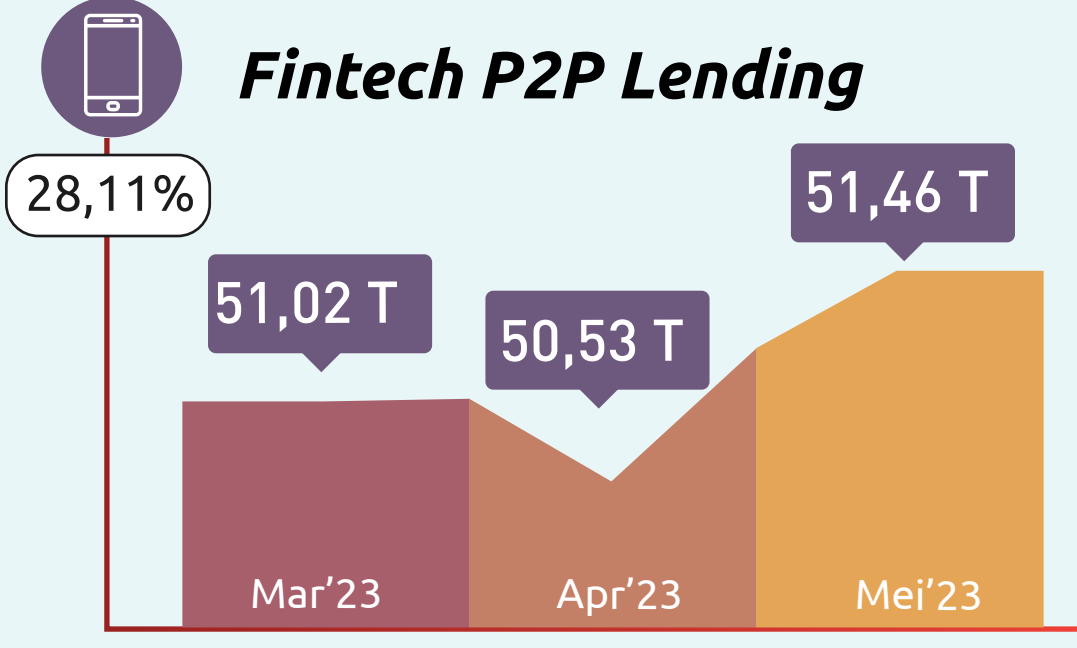
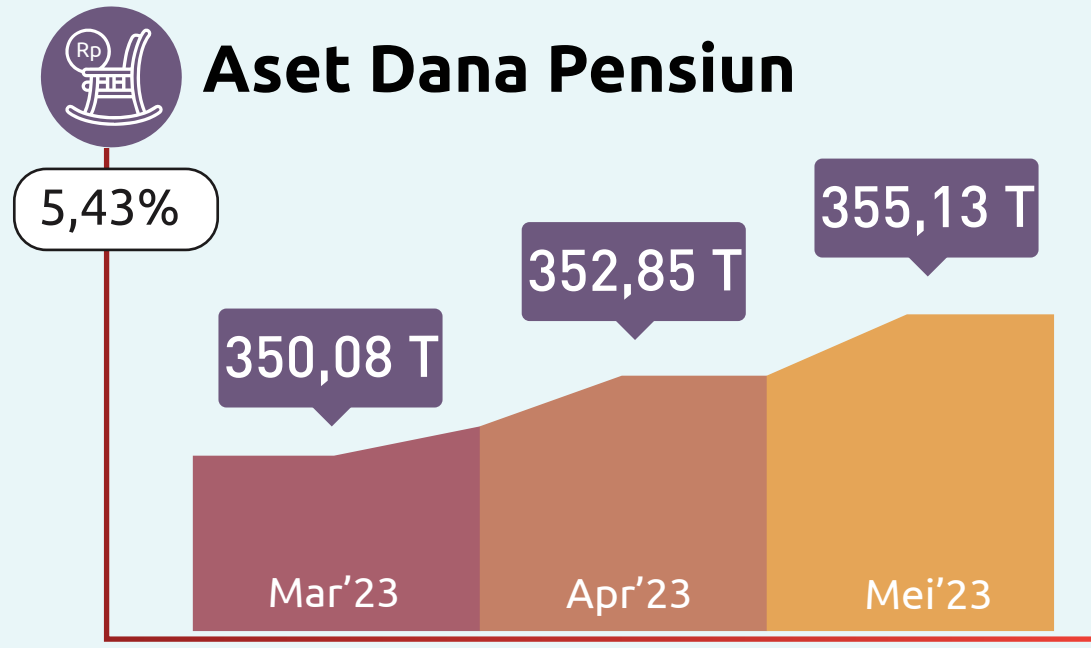
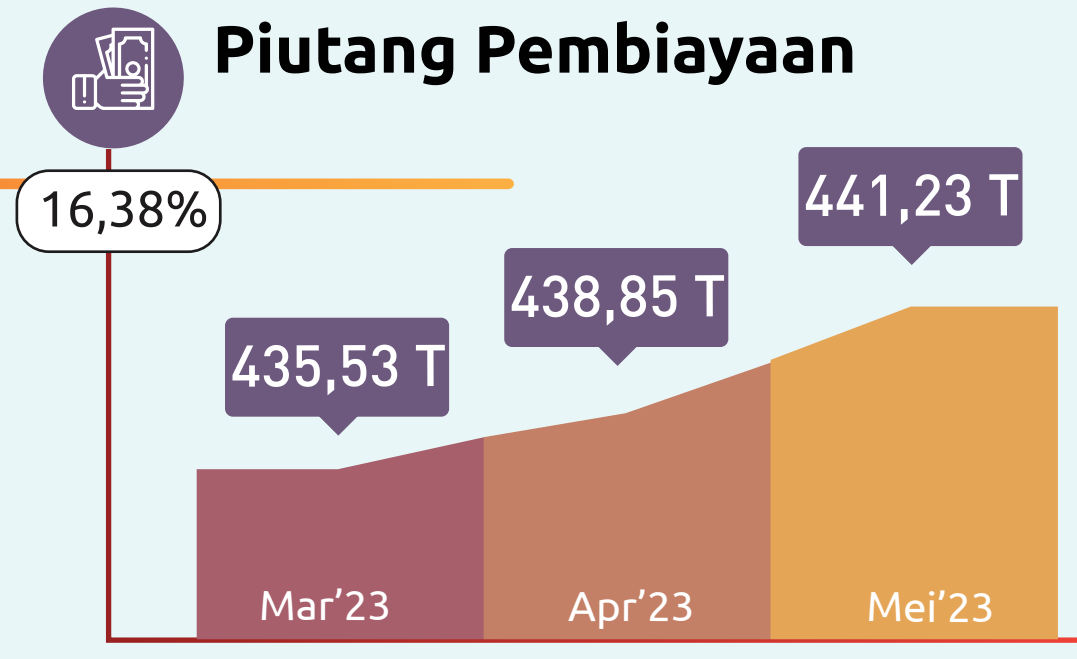
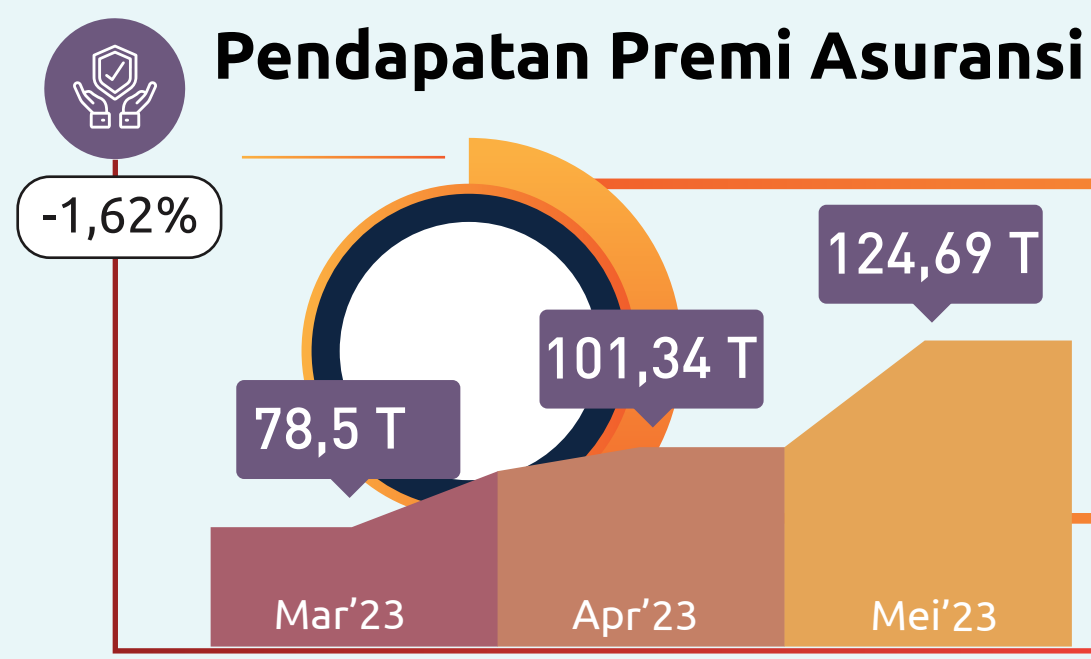
Kredit Konsumsi

9,62% yoy



Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 72/GKPB/OJK/VII/2023

IKNB



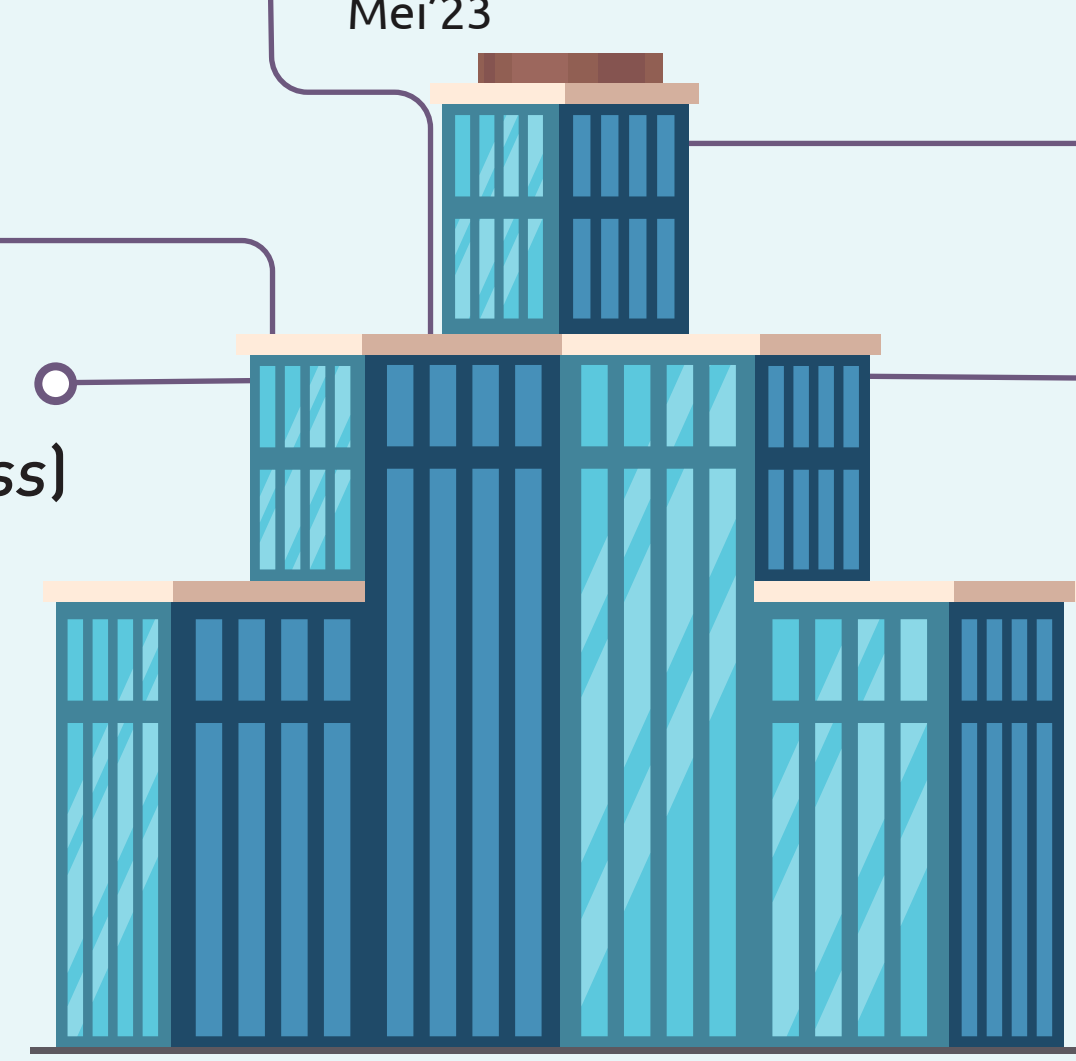
RBC Asuransi Umum
307,07%
Mei'23

RBC Asuransi Jiwa
462,80%
Mei'23

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
2,20x
Mei'23

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)
2,63%
Mei'23

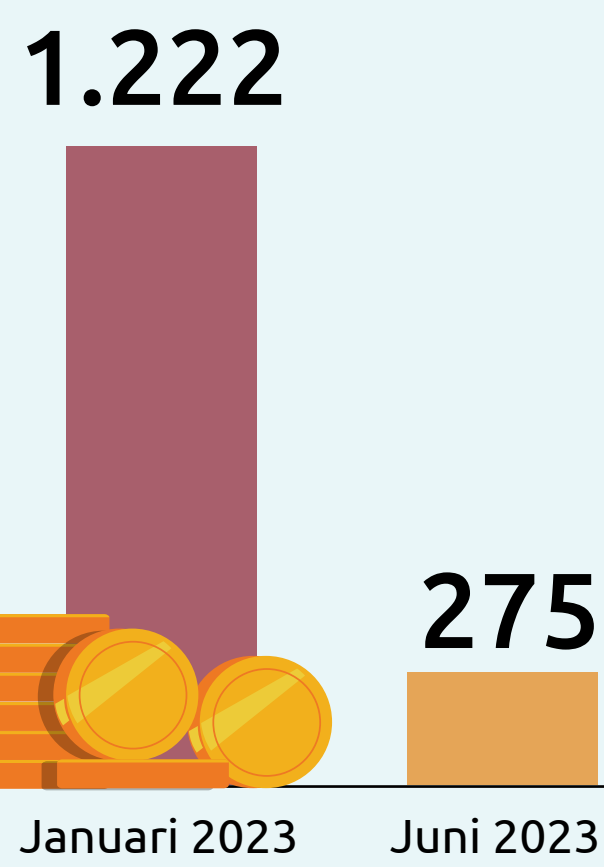
TWP 90 Fintech P2P Lending
3,36%
Mei'23



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Satgas Waspada Investasi (SWI)

PENGADUAN



Program literasi dan edukasi keuangan

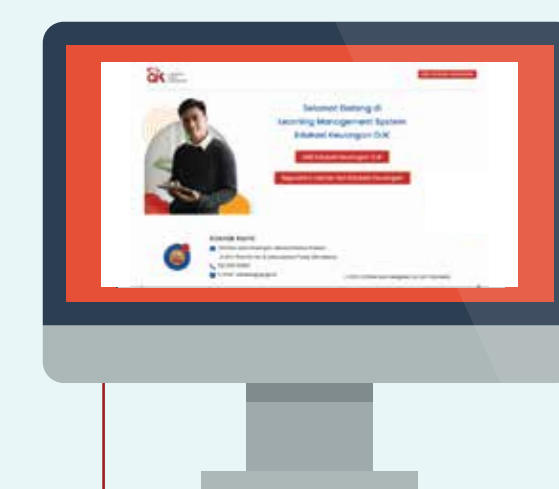
Kegiatan Edukasi
• 1.010 kegiatan
• 284.680 peserta
Per 30 Juni 2023



Sikapi Uangmu
• 213 konten Edukasi
• 1.074.824 Penonton
Per 30 Juni 2023



LMSKU OJK



Per 30 Juni 2023

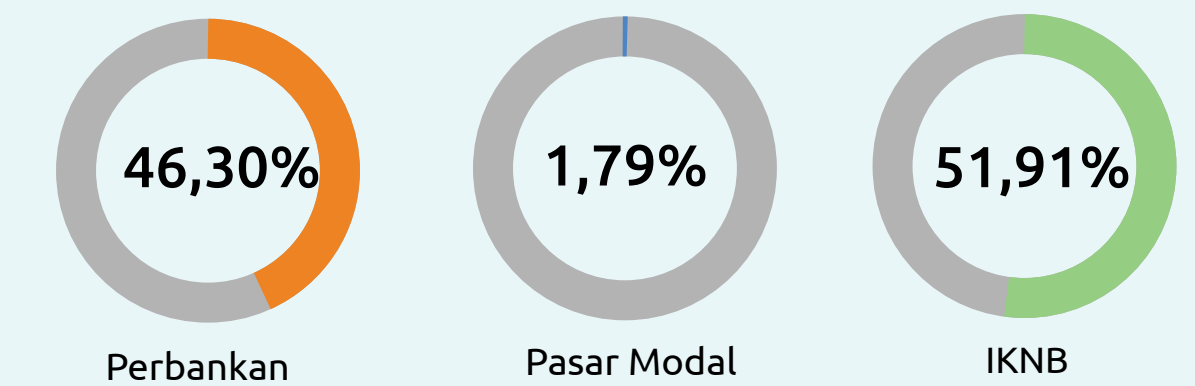
• 21.147 pengguna
• 22.451 kali akses modul
• 17.213 sertifikat kelulusan modul

144.151 layanan (Januari s.d 30 Juni 2023)

36 pengaduan berindikasi pelanggaran

933 sengketa masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

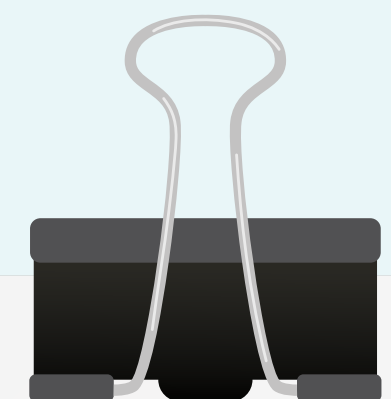
10.071 pengaduan



Selesai oleh Internal Dispute Resolution 79,06%; Dalam Proses 20,94%

Arah Kebijakan OJK

OJK mengambil langkah kebijakan yang terukur agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan sektor jasa keuangan dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.



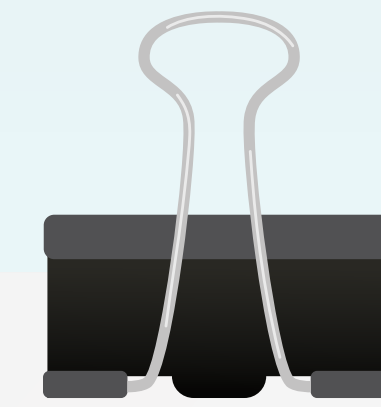
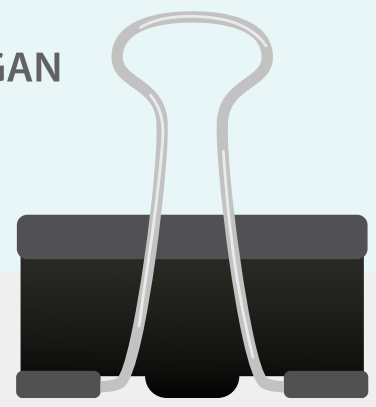
Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Memonitor erat perkembangan rasio klaim dan pertumbuhan premi asuransi jiwa terutama untuk lini usaha PAYDI
- Secara berkala melakukan *supervisory action* terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), khususnya kepada pengurus dan pendiri Dana Pensiun untuk memperbaiki tingkat pendanaan Dana Pensiun. OJK berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengatasi permasalahan pendanaan pada Dapen BUMN dalam rangka melindungi kepentingan peserta.
- Mengidentifikasi eksposur LIBOR di industri perbankan serta mengawal langkah persiapan industri perbankan terhadap diskontinu LIBOR.



Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan Infrastruktur Pasar

- Memperkuat integritas laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui penyempurnaan POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (RPOJK AP KAP)
- Akan melakukan pengaturan terkait Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (*KYC Administration*) yang memungkinkan data nasabah dikelola secara *centralize platform*
- Berkomitmen untuk memberlakukan pemenuhan ketentuan mengenai kepemilikan aktuaris perusahaan bagi perusahaan perasuransian, sebagai kompetensi utama yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian
- Menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan



Penguatan Tata Kelola OJK

- Bersinergi dengan Kementerian Keuangan, KPK dan BPK dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas OJK dan governansi sektor jasa keuangan
- Menyelenggarakan kegiatan Forum Penguatan Governansi SJK Tahun 2023 bagi LJKNB, khususnya perusahaan perasuransian dan dana pensiun, serta steering committee PSAK 74
- Proaktif menyelenggarakan Diskusi Penegakan Integritas dan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)
- Melakukan *continuous improvement* pada infrastruktur pendukung pengawasan internal



Kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen

- Menginisiasi *Kick Off Generic Model* Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Kampung Nagari Sumpu dan Nagari Taram, Provinsi Sumatera Barat. GM EKI akan direplikasi di berbagai wilayah perdesaan di bawah koordinasi TPAKD untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan desa secara terpadu guna mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan
- Memperluas implementasi program Desaku Cakap Keuangan untuk percepatan dan pemerataan literasi keuangan di seluruh wilayah Indonesia
- Memperluas jejaring aliansi strategis dengan berbagai kementerian/lembaga dan mitra strategis seperti platform media sosial
- Mendukung penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk menunjang terwujudnya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM dengan memperhatikan keunggulan dan kekhasan daerah setempat
- Memantau penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian



Kebijakan Penanganan LJK Dalam Perhatian Khusus

Data 2014 s.d 23 Juni 2023

- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 104 perkara (82 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 17 perkara IKNB)
- 89 perkara telah diputus oleh pengadilan (71 perkara *in kracht*, 2 perkara proses banding, dan 16 perkara tahap kasasi)

OJK mendukung transisi yang baik (*smooth*) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (*targeted*) sehingga tidak menimbulkan guncangan (*cliff effect*). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard.

OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.

OJK senantiasa mencermati perkembangan isu global dan domestik serta bersinergi dengan KSSK dan pihak terkait lainnya untuk dapat mengambil langkah mitigasi yang diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan antara stabilitas sektor jasa keuangan nasional dan tetap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

